

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ALOKASI BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

MUH ADIB IRSYADI
B 200 100 153

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417, 719483 Fax. 715448 Surakarta 57102
Website : <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : **Dr. Zulfikar S.E M.si**

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : **MUH ADIB IRSYADI**

NIM : **B 200 100 153**

Program Studi : **S1 Ekonomi dan Bisnis**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, Desember 2014

Pembimbing

(Dr. Zulfikar S.E M.si)

ANALISI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL

(Studi empiris pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah)

Abstark : Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh dan menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap aloaksi Belanja Modal pada kabupaten dan kota di jawa tengah

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis time series data dan cross section data (data panel) dalam bentuk tahunan. Data time series yang digunakan dimulai dari periode 2012-2013, sedangkan data cross sectionnya adalah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah provinsi jawa tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji t sebagai berikut DAU diperoleh t-hitung sebesar 3,021. DAK diperoleh t-hitung sebesar -0,682, PAD diperoleh t-hitung sebesar 7,401 dan Silpa diperoleh t-hitung sebesar 4,748. Dari hasil ini membuktikan bahwa besarnya thitung terletak di daerah penolakan H_0 yaitu thitung lebih besar dari ttabel atau $4,748 > 2,00$. H_1 diterima didaerah antara $-2,00 < thitung < 2,00$. dan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dari hasil analisis uji F uji F diperoleh sebesar 50,159. Ternyata besarnya Fhit terletak di daerah penolakan H_0 , yaitu Fhit lebih besar dari Ftabel atau $50,159 > 2,53$. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,770, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model DAU (X1), DAK (X2), PAD (X3), Silpa (X4), menjelaskan variasi Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,0% dan 23% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

A. Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tranparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan

daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJP-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Prasetyantoko dalam harian Seputar Indonesia (21/12/11) yakin bahwa anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Bertolak dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana DAU, DAK, PAD dan SiLPA berpengaruh pada alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menurut Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemda mencakup pembagian keuangan antara Pusat dan Pemda secara proporsional, demokrasi, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (Mardiasmo, 2002b). Anggaran yang merupakan blue print organisasi (Mahmudi, 2011) memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2011).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

Dan data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli

Daerah dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi nilainya semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dan sisi pengeluaran dapat dilihat kecendrungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

C. Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang telah dikembangkan para ekonom. WW Rostow dan RA Musgrave berpendapat bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ada perbedaan fokus alokasi sumber daya antara negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka dan kualitas sumber daya manusianya.

Menurut Mardiasmo (2004) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada membayar pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin.

Menurut Wong dalam Adi (2006), pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak dan retribusi yang merupakan komponen PAD merupakan nilai tambah yang

diperoleh dari sektor industri yang berkembang optimal. Sektor industri tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

D. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dan Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

E. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

F. Pendapatan Asli Daerah

PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed-list*) artinya bahwa Pemerintah

daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

G. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

H. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan analisis panel data. Analisis panel data adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (timeseries) dengan data antar individu (cross section). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama disurvei dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003).

Data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat Kuantitatif merupakan data panel yaitu kombinasi antara data time series dan data cross section kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2013 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belanja modal yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (DJPK KEMENKEU) RI,

B. Metode Analisis Data

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap semua sampel, dalam analisis deskriptif ini alat-alat yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi atas variable-variabel penelitian. Variabel dalam penelitian adalah DAU, DAK, PAD

dan SiLPA. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang DAU, DAK, PAD dan SiLPA pada 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2010-2013.

HASIL DAN ANALISIS

A. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data time series dan data cross section Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Silpa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal tahun 2012-2013.

Data yang diperoleh dalam penelitian dari 36 Kabupaten/kota adalah:

Tabel IV.2

Mean, Median, Mode, Std. Deviation, Minimum dan Maximum

Keterangan	DAU	DAK	PAD	SILPA	Alokasi Belanja Modal
Mean	754107.0615	63685.1692	124178.2769	78019.3385	224889.4769
Median	763427.0000	67487.0000	95290.0000	63122.0000	204630.0000
Mode	325710.00 ^a	10404.00 ^a	55401.00 ^a	1000.00 ^a	86188.00 ^a
Std. Deviation	206904.1248 9	21985.5246 3	109034.9280 7	58359.1599 3	98135.30402
Minimum	325710.00	10404.00	55401.00	1000.00	86188.00
Maximum	1197315.00	118902.00	714027.00	258058.00	719171.00

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa DAU nilai mean sebesar 754107,0615, median sebesar 763427, mode sebesar 325710, Std. Deviation sebesar 201260.09, nilai minimum sebesar 325710, dan nilai maximum sebesar 1197315.

DAK nilai mean sebesar 62829.8429, median sebesar 65263, mode sebesar 6058, Std. Deviation sebesar 22405.11857, nilai minimum sebesar 6058, dan nilai maximum sebesar 118902.

PAD nilai mean sebesar 124178.2769, median sebesar 95290.0000, mode sebesar 55401, Std. Deviation sebesar 109034.92807, nilai minimum sebesar 55401, dan nilai maximum sebesar 714027.

Silpa nilai mean sebesar 78019.3385, median sebesar 63122, mode sebesar 1000, Std. Deviation sebesar 58359.15993, nilai minimum sebesar 1000, dan nilai maximum sebesar 258058.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Alokasi belanja modal nilai mean sebesar 224889,4769, median sebesar 204630, mode sebesar 86188, Std. Deviation sebesar 98135,30402, nilai minimum sebesar 86188, dan nilai maximum sebesar 719171.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan DAU (X_1), DAK (X_2), PAD (X_3), dan Silpa (X_4) terhadap Alokasi belanja modal (Y) baik secara individu dan bersama-sama. Sehingga hipotesis yang disampaikan bahwa model DAU (X_1), DAK (X_2), PAD (X_3), Silpa (X_4), menjelaskan variasi Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terbukti kebenarannya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsisten dengan penelitian Widiyanto (2004) berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi DIY dan Jawa Tengah” dari hasil penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara DAU dan PAD terhadap perubahan belanja pemerintah di Propinsi DIY dan Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini adanya konsisten dengan penelitian terdahulu Pungky Ardhani (2011) berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2009. Dari penelitian terdahulu diperoleh bahwa PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Begitu juga dalam penelitian Kusnandar yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal” tidak terdapat konsistensi, yang dinyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan PAD, Silpa dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan variabel yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh terhadap Alokasi belanja modal secara individu” terbukti kebenarannya, dibuktikan dengan hasil analisis uji t dapat diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara DAU (X_1), DAK (X_2), PAD (X_3), dan Silpa (X_4) terhadap Alokasi belanja modal secara individu. Dibuktikan dengan hasil uji t untuk DAU diperoleh t_{hitung} sebesar 3,021. DAK diperoleh t_{hitung} sebesar -0,682, PAD diperoleh t_{hitung} sebesar 7,401 dan Silpa diperoleh t_{hitung} sebesar 4,748. Dari hasil ini membuktikan bahwa besarnya t_{hitung} terletak di daerah penolakan H_0 yaitu t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $4,748 > 2,00$. H_1 diterima di daerah antara $-2,00 \leq t_{hitung} \leq 2,00$. DAU, PAD dan Silpa secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi belanja modal. Sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa uji F diperoleh sebesar 50,159. Ternyata besarnya F_{hit} terletak di daerah penolakan H_0 , yaitu F_{hit} lebih besar dari F_{tabel} atau $50,159 > 2,53$. Sehingga secara bersama-sama ada pengaruh

yang signifikan DAU (X_1), DAK (X_2), PAD (X_3), dan Silpa (X_4) terhadap Alokasi belanja modal (Y).

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan analisis menunjukkan ada pengaruh yang signifikan DAU (X_1), DAK (X_2), PAD (X_3), dan Silpa (X_4) terhadap Alokasi belanja modal (Y), sehingga perlu dipertahankan.
2. Perlu adanya penambahan bukan hanya variabel-variabel tersebut, juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi belanja modal pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. *Studi atas belanja modal pada panggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2, 17-32.
- Agung Nugroho, Bhuoro. 2007. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Anggiat Situngkir. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara).
- Anggreani Dewi. 2012. Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.
- Ardhani Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. 20 juni 2014. <http://www.djpk.depkeu.go.id/document/article>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. 20 juni 2014. <http://www.djpk.depkeu.go.id/document/article>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. Deskripsi dan Analisis apbd 2012. Kementerian Keuangan. Jawa Tengah.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Deskripsi dan Analisis apbd 2013. Kementerian Keuangan. Jawa Tengah.

- Efferin, Sujoko, & Darmadji, Stevanus Hadi & Tan, Yuliawati. 2008. Metode penelitian akuntansi; mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Halim 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Maesaroh & Moerti, Wisnoe. 2011. Sisa anggaran untuk infrastruktur. Seputar Indonesia. 26 Januari 2012. <<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak>>
- Maharani, Mayzestika. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi, Yogyakarta.
- Prakosa ,Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY).
- Rahmawati Nur Indah 2010, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah(Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sulistyawati Diah 2011, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal.